

Evaluasi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Aset Tetap PLN Dampak dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada PT. PLN (Persero)

Indri Nur Hidayati, Diyah Probowulan dan Moh. Halim
Universitas Muhammadiyah Jember, Jember-Indonesia, Indonesia
Indrinurhidayati13@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the application of fixed assets and POJK regulation No. 6 regarding the sale and purchase agreement of fixed asset electricity. This type of research is qualitative research with a descriptive analysis approach. The data source of this study uses primary and secondary data sources. Research data collection techniques using observation and interviews. its data analysis technique is to analyze the application of fixed asset accounting in accordance with financial accounting standards (PSAK) No. 16 and the sale and purchase agreement of electric assets in accordance with POJK No.6

The results showed that the company's fixed assets are in accordance with financial accounting standards (PSAK) No. 16 and the existence of POJK Regulation No.6 causes an increase in operating expenses and depreciation expenses.

Keywords: fixed assets, PSAK No. 16, POJK

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan aset tetap dan peraturan POJK No.6 tentang perjanjian jual beli tenaga listrik aset tetap. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi dan wawancara. teknik analisis data nya yaitu menganalisis tentang penerapan akuntansi aset tetap sesuai peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 16 dan perjanjian jual beli tenaga listrik aset tetap berdasarkan POJK No.6

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan sudah sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 16 dan dengan adanya Peraturan POJK No.6 menyebabkan adanya kenaikan beban usaha dan beban penyusutan.

Kata Kunci : aset tetap, PSAK No. 16, POJK

Pendahuluan

Perusahaan merupakan organisasi modern yang mempunyai kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Tujuan semua perusahaan yaitu mencari laba. Disamping

mencari laba, tujuan perusahaan yaitu mencakup pertumbuhan yang terus menerus (*Growth*), kelangsungan hidup (*Survival*), dan kesan positif di mata publik (*Image*). Menurut PSAK No.16 (2015) Aset tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya lebih dari satu periode (satu tahun) dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan

dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset tetap digolongkan menjadi dua kategori yaitu aset berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tak berwujud (*intangible assets*). Aset tetap merupakan komponen signifikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pada aset tetap merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk dapat menyediakan informasi yang benar kepada penggunaan laporan keuangan, manajemen perusahaan harus menggunakan norma-norma pelaporan keuangan yang baik dan dapat diterima umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para *Stakeholder* perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. (Marisi P. Purba, 2013)

Proses pencatatan serta penyajian berdasarkan PSAK 16 memaparkan seluruh proses akuntansi tentang aset tetap, mulai dari awal pengambilan data, pengakuan awal hingga penghentian aset tetap setelah itu yang terakhir evaluasi. Perlakuan akuntansi aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akan dapat membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Maksudnya yaitu aset tetap yang dinilai atau dicatat terlalu besar dapat berpengaruh terhadap nilai penyusutannya, yang mana nilai penyusutannya akan terlalu besar, sehingga laba menjadi terlalu kecil. Begitu pula sebaliknya jika aset tetap tersebut dinilai atau dicatat terlalu kecil, maka penyusutan yang dilakukan akan terlalu kecil pula, sehingga laba akan menjadi terlalu besar. Hal seperti inilah yang akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

Penelitian yang saya lakukan di PT. PLN (Persero) dilatar belakangi oleh masalah penyusutan pada aset tetap. Permasalahan yang terjadi yaitu: pertama pada beban penyusutan Perseroan meningkat sebesar Rp. 2.105.294 juta atau 8,3% menjadi Rp. 2.512.150 juta pada tahun 2016, dari Rp. 25.406.856 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan terkait dengan kenaikan nilai aset tetap yang timbul dari hasil revaluasi aset dan penambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2016 yang sebagian diimbangi dengan penghentian penerapan ISAK 8 ke Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2016 sejak

penyesuaian dengan POJK No.6/2017. Beban penyusutan Perseroan termasuk biaya yang berkaitan dengan Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP tertentu yang tidak dicatat sebagai beban penyusutan pada tahun 2016. Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2015, biaya penyusutan akan meningkat sebesar Rp. 6.093.510 juta atau 28,4% menjadi Rp. 27.512.150 juta pada tahun 2016 dari Rp. 21.418.640 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan sehubungan dengan kenaikan nilai aktiva tetap sebagai hasil revaluasi aset yang dilakukan pada akhir tahun 2015 dan penambahan aset tetap yang diperoleh pada 2016 (www.pln.co.id).

Permasalahan yang kedua yaitu jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.274.576.230 juta, menurun sebesar Rp. 39.794.651 juta atau 3,03% dari Rp. 1.314.370.881 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada aset tetap dan aset tangguhan. Jumlah aset tetap sendiri pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.145.529.527 juta, menurun sebesar Rp. 42.350.063 juta atau 3,57% dari Rp. 1.187.879.590 juta pada tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian atas POJK No.6/2017 di tahun 2016 (Perspektus PT. PLN, 2017:91). Dari dua permasalahan diatas dapat menjadi bahan pertimbangan saya dalam melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dan diberikan tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam menjalankan usahanya, PT. PLN (Persero) terdiri dari beberapa proses bisnis inti yang dibagi menjadi tiga unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit bisnis penyaluran dan unit bisnis distribusi.

Kegiatan operasional pada PT. PLN (Persero) didukung oleh pengguna aset tetap, karena itu diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang baik dari manajemen perusahaan. Kebijakan dan pengelolaan aktiva tetap ini harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di perusahaan, seperti perolehan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pencatatan akuntansinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero)?

Bagaimana perjanjian jual beli aset tetap menurut POJK?

Bagaimana dampak dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan aktiva tetap pada PT. PLN (Persero)?

Kajian Teori

Pengertian Aset Tetap

Menurut Toto Sucipto, dkk (2011:06) aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama (lebih dari satu periode akuntansi). Aset tersebut digunakan dalam kegiatan normal perusahaan serta mempunyai nilai material (relatif besar nilainya), misalnya tanah, gedung/bangunan, mesin-mesin, kendaraan, peralatan toko, dan peralatan kantor.

Menurut Mardiasmo (2000:159) aktiva tetap adalah aktiva berwujud perusahaan yang dipergunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aktiva tetap mempunyai masa kegunaan lebih dari satu periode akuntansi, meliputi : aktiva yang tidak disusut (Tanah) dan aktiva yang dapat disusutkan, misalnya bangunan, mesin-mesin, peralatan dan lain-lain.

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1994:23) Aktiva tetap dapat dikelompokkan dalam berbagai sudut antara lain:

1. Sudut Substansi, Aktiva Tetap dapat dibagi :
 - a. *Tangible Assets* atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan
 - b. *Intangible Assets* atau aktiva yang tidak berwujud seperti, HGU, HGB, *Goodwill-Patents, Copyright, Hak Cipta, Franchise* dan lain-lain
2. Sudut disusutkan atau tidak
 - a. *Depreciated Plant Assets* yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti *building* (bangunan), *equipment* (peralatan), *machinary* (mesin), inventaris, jalan dan lain-lain.
 - b. *Undepreciated Plant Assets*, aktiva tetap yang tidak disusutkan seperti land (lahan).

Perolehan Aset Tetap

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1994:24) PAI (Prinsip akuntansi Indonesia) memberikan pedoman pencatatan pada saat perolehan sebagai berikut:

“Aktiva tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dicatat berdasarkan harga beli ditambah biaya yang terjadi dalam rangka menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan, seperti: bea masuk, pajak penjualan, biaya pengangkutan, biaya pemasangan dan lain sebagainya.”

Pengeluaran Setelah Perolehan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1994:48) pengeluaran dibagi menjadi dua macam :

1. Pengeluaran Biaya (*Revenue Expenditures*) adalah pengeluaran yang tidak dianggap menambah harga pokok dalam arti bahwa biaya itu harus dibebankan ke perkiraan laba rugi.
2. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditures*) adalah pengeluaran yang menambah harga pokok aktiva yang bersangkutan dalam arti pengeluaran itu dikapitalisir.

Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAK No. 16 (2011:15) suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan.

Menurut PSAK No. 16 (revisi 2011) biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengukuran Pada Saat Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Menurut PSAK No. 16 (Revisi 2011) biaya perolehan aset tetap meliputi :

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Penyusutan Aset Tetap

Di samping pengeluaran dalam masa penggunaan, masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa penggunaan aktiva tetap. Yang dimaksud dengan penyusutan menurut akuntansi adalah :

“Pengalokasian harga pokok aktiva tetap selama masa penggunaannya”. Atau dapat juga kita sebut sebagai biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aktiva tetap itu dalam proses produksi.”.

Menurut PSAK No. 16 (2011:44) menyebutkan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.

Metode-Metode Penyusutan

Menurut Sofyan S. Harahap (1994:56) untuk menghitung penyusutan dapat dipergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. *Straight Line Method* (Metode Garis Lurus)

Dalam metode ini aktiva tetap dianggap sama penggunaannya sepanjang waktu. Sehingga beban penyusutan diitung sama rata.

Rumus untuk menghitung penyusutan metode garis lurus yaitu:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomi}}$$

2. *Sum Of The Years Digits Method* (Metode Jumlah Angka Tahun)

Dalam metode ini beban penyusutan pada mulanya tinggi dan selanjutnya semakin menurun. Beban penyusutan ini dihitung dengan cara menjumlahkan semua angka (digit) umur aktiva tersebut. Pandangan yang dianut metode ini adalah bahwa aktiva pada umur awalnya dianggap memberikan performance yang lebih besar pada perusahaan sehingga beban penyusutan pada awal pemakaiannya lebih besar.

Rumus untuk menghitung penyusutan metode jumlah angka tahun yaitu:

$$\text{Jumlah Angka Tahun} = \frac{n+1}{2} \times n$$

Penurunan Nilai

Menurut PSAK No.16 (2011:64) menyebutkan bahwa dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 (revisi 2009): *Penurunan Nilai Aset*. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana entitas me-review jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan

dari aset dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan

Menurut PSAK No.16 (2011:67) jumlah yang tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat :

1. Dilepas; atau
2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Pengungkapan

Menurut PSAK 16 (2011:74) laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan yang digunakan
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06 POJK.04/2017

Perlakuan Akuntansi

Pada pasal 2 perlakuan akuntansi menjelaskan tentang:

1. Dasar penyusunan laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum
2. Prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup:
 - a. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI);
 - b. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI); dan
 - c. Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan / atau huruf b dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, Emiten atau

Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c

Pada pasal 3 menjelaskan tentang transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli.

Ketentuan Peralihan

Pada pasal 7 ketentuan peralihan menjelaskan tentang:

1. Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017
2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi lebih awal, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016

Pada pasal 8 ketentuan peralihan menjelaskan tentang:

1. Dalam hal penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik telah berakhir, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a dan / atau huruf b secara prospektif
2. Kewajiban penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap laporan keuangan periode tahun buku setelah berakhirnya penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Metode Penelitian

Rancangan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. (Emzir, 2010:03)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Indrianto dan Supomo (2016:12) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social

berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang diambil bersumber dari website resmi PT. PLN (Persero), serta tambahan dari referensi dari jurnal dan artikel sejenis yang diakses melalui media internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan tahunan PT. PLN (Persero) tahun 2015-2016
2. Laporan tahunan PT. PLN (Persero) tahun 2017-2018

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari response bias. (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2016:157)
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2016:152)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perolehan Aset Tetap

Pada prinsipnya penilaian aset tetap pada perusahaan dilakukan berdasarkan harga perolehan. Penilaian atas dasar lain dimungkinkan bila diperoleh dasar yang kuat (otoritas). Berikut perbandingan perolehan aset tetap menurut PSAK No.16 dengan PT. PLN (Persero):

Tabel 4.1
Perbandingan Perolehan Aset Tetap

PSAK No. 16	PT. PLN (Persero)	Ket
Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan ppn masukan	Harga perolehan suatu aktiva tetap yang dicatat PT. PLN (Persero) meliputi: pajak, biaya jasa imbalan kerja atas proyek konstruksi, biaya material dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menyiapkan aktiva tersebut sehingga siap digunakan.	Sesuai
Aset tetap yang diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk unsur bunga	Unsur bunga dikeluarkan dari harga perolehan aset tetap. Jadi tidak ada unsur bunga dalam komponen biaya perolehan aset tetap.	Sesuai

Sumber : data olahan 2020

Penerapan akuntansi aset tetap PT. PLN (Persero) telah sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 16.

Pengakuan Aset Tetap

Biaya perolehan setiap aset tetap pada PT. PLN (Persero) dapat diukur secara andal yaitu dengan menjumlahkan harga perolehan dan seluruh biaya yang terjadi hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan dan dengan disertai adanya dokumen atau catatan pendukung atas perolehan aset tersebut. Berikut perbandingan pengakuan aset tetap menurut PSAK No.16 dengan PT. PLN (Persero):

Tabel 4.2
Perbandingan Pengakuan Aset Tetap

PSAK No.16	PT. PLN (Persero)	Ket
Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke perusahaan.	Perusahaan memperoleh manfaat ekonomi berupa (kwh jual / Pendapatan) dimasa depan.	Sesuai
Biaya perolehan	Biaya perolehan	Sesuai

dapat diukur dengan handal	aset tetap PT. PLN (Persero) dapat diukur secara andal.
----------------------------	---

Sumber: data olahan 2020

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berikut perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap menurut PSAK No.16 dengan PT. PLN (Persero):

Tabel 4.3

Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

PSAK No. 16	PT. PLN (Persero)	Ket
Suatu aset tetap dieleminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen ditarik penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian yang akan datang	Pengeliminasiannya suatu aset dari neraca karena masa manfaat keekonomian sudah habis. Dalam hal ini harga perolehan sama dengan akumulasi penyusutan.	Sesuai
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi	Adanya pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan rugi laba berkaitan dengan penghentian atau pelepasan asset	Sesuai
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan ditahan untuk dilepaskan dinilai terendah antara jumlah tercatatnya dan nilai realisasi netto	Apabila ada aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif maka yang menjadi dasar penilaian adalah nilai yang terendah antara jumlah tercatat dan nilai realisasi netto (penyelesaian) yaitu penilaian aset dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal.	Sesuai

Sumber : data olahan 2020

Pengungkapan Aset Tetap

Berikut perbandingan pengungkapan aset tetap menurut PSAK No.16 dengan PT. PLN (Persero):

Tabel 4.4

Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap

PSAK No. 16	PT. PLN (Persero)	Ket
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan jumlah tercatat bruto untuk setiap dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan	Tidak diungkapkan dasar-dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto	Sesuai
Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan	Perusahaan mengungkapkan umur manfaat dari setiap kelompok aset tetap	Sesuai
Jumlah tercatat bruto atau akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode	Perhitungan akumulasi penyusutan diungkapkan dalam daftar aset tetap	Sesuai

Sumber : data olahan 2020

Dampak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik POJK No.6 POJK.04/2017

Berikut perbandingan peraturan jual beli tenaga listrik sebelum adanya peraturan POJK No. 6 dengan sesudah adanya peraturan POJK No.6 tentang perjanjian jual beli tenaga listrik :

Tabel 4.5

Perbandingan Dampak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

	Sebelum adanya POJK	Sesudah adanya POJK
Beban usaha	Beban usaha pada tahun 2015 sebesar Rp.225.574.076. dan untuk pembelian tenaga listrik pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.420.859	Beban usaha perusahaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 254.449.802. dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 28.875.726 atau 12,80% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan beban usaha perusahaan pada tahun 2016 disebabkan oleh pembelian tenaga listrik yang meningkatkan sebesar Rp. 55.308.531 atau 1.251,08% dibandingkan tahun 2015.
Penyusutan	Beban penyusutan pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.406.856	Beban penyusutan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.105.294 atau 8,3% menjadi Rp. 27.512.150.

Sumber : data olahan 2020

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) dengan PSAK No.16 sebagai berikut:

1. Untuk kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. PLN (Persero) berdasarkan PSAK No.16 telah sesuai sesuai.
 - a. Dimulai dari perolehan aset tetapnya sendiri PT. PLN (Persero) menggunakan 4 cara yaitu dilakukan dengan cara pembelian tunai, transfer antar unit, serah terima pekerjaan/proyek dan hibah
 - b. Pengakuan aset tetap PT. PLN (Persero) telah memberikan manfaat bagi perusahaan dan entitas anak untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Manfaat tersebut berupa penjualan tenaga listrik (kwh jual/ Rp pendapatan) dimasa depan
 - c. Pengukuran aset tetap PT. PLN (Persero) diakui sebesar harga perolehan, dimana harga perolehan itu merupakan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pajak,

biaya jasa imbalan kerja atas proyek konstruksi, biaya material, fee profesional.

- d. Pengungkapan aset tetap PT. PLN (Persero) diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset, kelompok dan fungsi aset sesuai dengan peraturan perusahaan, jumlah penyusutan, rugi penurunan nilai dari penghapusan aset, serta rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode.
2. Perjanjian jual beli tenaga listrik PT. PLN (Persero) menerapkan lebih awal POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa, mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.
3. Dampak dari peraturan POJK No.6 tentang perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu berdampak pada beban usaha dan beban penyusutan aset tetap, dampak tersebut mengakibatkan kenaikan jumlah beban usaha dan beban penyusutan pada tahun 2016. Peningkatan beban usaha perusahaan pada tahun 2016 disebabkan juga oleh pembelian tenaga listrik yang meningkatkan sebesar Rp. 55.308.531 atau 1.251,08% dibandingkan tahun 2015. Dan Dampak tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian POJK No. 6 dan penambahan kapasitas listrik swasta sebesar 1.782 MW

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam pengoperasian perusahaan dan pada laporan keuangan, sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam menyajikannya pada laporan keuangan.
2. Untuk peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.6 untuk diperjelaskan lagi tentang ketentuan-ketentuan tentang perlakuan akuntansi atas transaksi perjanjian jual beli tenaga listrik

Penutup

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melipahkan segala nikmat kesehatan, pemahaman dan kasihNya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dalam kesempatan ini kami ucapkan sebanyak-

banyaknya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Surono, Ibu Luluk Hariati, Adekku yang paling ganteng Bagus Prasetyo dan semua keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung saya, memberikan kepercayaan, motivasi dan banyak mengeluarkan berupa materi yang tidak banyak demi kesuksesan saya.
2. Diah Probowulan, SE., MM selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan tentang proses dalam saya mengerjakan skripsi ini.
3. Moh. Halim, S.E.,M.SA Selaku dosen pembimbing yang terus memberikan wawasan dan saran-saran yang baik dalam proses saya mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat saya sekaligus keluarga kontrakan sholehah yang selalu berjuang bersama – sama dan selalu memberikan semangat Bakdiatil Ahda, Intan Sarifa, Ainun Lailatul Jannah, Ika Sri Wahyuni, Wiwik Puji, Nana Shaadiq, Linda Aprilia.
5. Temanku yang ku sayang Soviatul Hasanah yang selalu menemani, membantuku, memberikan semangat dan selalu mengingatkan untuk tidak cepat mengeluh mulai awal perjuangan dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Teman terbaikku Dewi Nurma Sari yang mulai dari maba selalu kemana-kemana bersama, yang selalu memberikan saran apa pun itu.
7. Teman Akuntansi B yang sudah selalu bersama selama 4 tahun ini dan selalu berjang bareng walaupun terkadang banyak masalah yang terjadi, tetap semangat dan semoga lulus tepat waktu.
8. Teman satu organisasi (IMM Akademos) yang selama 3 tahun ini kita berjuang bersama mulai dari maba Mela Oktarini, Atika Fitriati, Aisyah Fisundah, Soviatul Hasanah, Dona, Rofin, Choni, Toni, Faisal, Junaidi. Terimakasih sudah saling memberikan semangat dan semoga kita nanti menjadi orang-orang yang sukses.

Daftar Pustaka

- Apriliyanto, Angga. 2016. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 Pada Banin Jaya Farm Bondowoso*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Erhans A. 2013. *Akuntansi 1*. Jakarta: Ercontara Rajawali.
- Harahap, Sofyan S. 1994. *Akuntansi Aset Teatap : Akuntansi, Pajak, Revaluasi, Leasing*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan Aset Tetap (PSAK NO. 16)*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *ED PSAK 17 (Revisi 2012)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntansi Keuangan
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi 1. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta
- J. Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 Edisi 7*. STIE YKPN : Yogyakarta
- Kusnadi, dkk. 2002. *Pengantar Akuntansi Keuangan 2*. Malang: Taroda
- Maharani, Rifrinda. 2015. *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 Pada PT. Pertama Mina Sutra Perkasa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Keuangan Dasar* Edisi 2. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta
- Martiani, D. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Edisi 1. Salemba Empat: Bandung
- Ningtyas, Jilma D.A, dan Mulia, April. Agustus 2018. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 (Studi Kasus di PT. Pisma Putra Textile). *Owner Riset dan Jurnal Akuntans*. Vol 2
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2017 Tentang Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
- Punusingon, Natalia, dkk. 2018. Analisis Penerapan PSAK No.16 Tentang Aset Tetap Pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Purba, Marisi P. 2013. *Akuntansi Keuangan : Aset Tetap Dan Aset Tak Berwujud*. Graha Ilmu.
- Putra, Trio Mandala. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA*. Vo. 1 No.3. P 190-198
- Rusdiyanto, dan N.I. Rohmah. Juli 2017. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 Pada PT. Swadaya Graha Di Gresik. *GEMA Ekonomi*. Vol 06. P 42-50
- Soemarso, S. R. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 2. Edisi 4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sucipto, Toto, dkk. 2011. *Akuntansi : Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Perusahaan Dagang*. Yudhistira : Jakarta Timur
- Susyanti, Steela Alfani, dkk. 2017. Evaluasi Penerapan PSAK No.16 Mengenai Aset Tetap Pada Pencatatan Tanah, Bangunan, Dan Mesin Di PT. Dong Bang Indo Tengar. *Ekonomi Akuntansi*.
- W. H. Kiki. 2016. *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 Pada PT. Temprina Media Grafika Jember*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember
- <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5822/Bab%201.pdf?sequence=9>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12612/Aset-Negara-Harus-Melek-dan-Berkeringat.html>
- <https://economy.okezone.com/read/2019/06/24/320/2070400/pln-cetak-laba-bersih-rp4-2-triliun-pada-kuartal-i-2019>
- <https://scadaku.wordpress.com/2014/05/22/komponen-komponen-peralatan-pada-switchyard-gardu-induk/>
- <https://www.warriornux.com/gardu-induk/>
- <https://www.pln.co.id>